RENJA

RENCANA KERJA

TAHUN 2023

DINAS PU BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
JL. SULTAN AGUNG NO. 17 A SIDOARJO
Telepon. (031) 8921942
Email : pubmsda@gmail.com Website : pubmsda.sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PU BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : ${nomor}
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PU BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PU BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang…

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sesuai dengan Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatanhukum dan akibat hukum yang sah.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402),
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136) ;

10. Peraturan Presiden .....

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sesuai dengan Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatanhukum dan akibat hukum yang sah.

10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 90);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

19. Peraturan Daerah....

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sesuai dengan Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatanhukum dan akibat hukum yang sah.

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 63);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo;
23. Surat Edaran Bupati Sidoarjo Nomor:050/2320/438.6.1/2022 tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Pengesahan Rencana Kerja (Renja) Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023.

KEDUA : Daftar Rencana Kerja Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tercantum dalam dokumen Renja dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sesuai dengan Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatanhukum dan akibat hukum yang sah.

KETIGA : Rencana Kerja Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 yang telah disahkan menjadi Pedoman dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023.

KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan Belanja Kegiatan Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo pada proses pembahasan di DPRD, maka Renja Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air disesuaikan dan ditetapkan kembali oleh Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Daftar Pelaksanan Anggaran (DPA) Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : S I D O A R J O
Pada Tanggal : 30 April 2022

Plt. KEPALA DINAS PU BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SIDOARJO

Ditandatangani secara elektronik oleh

DWI EKO SAPTONO, S.Sos., MM., MT.
NIP. .197002211990031002

DWI EKO SAPTONO. S.Sos.. MM . MT
Pembina Tk I
NIP. 197002211990031002

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sesuai dengan Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatanhukum dan akibat hukum yang sah.

KATA PENGANTAR

Nomor : 050/511/438.5.3/2022

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya , Rencana Kerja (RENJA) Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 telah dapat diselesaikan. Rencana Kerja (RENJA) Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Sidoarjo.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada Tahun 2023 merupakan Tahun Kedua Pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, Bab III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah, Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah serta Bab V Penutup.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen perencanaan OPD yang memuat kebijakan dan program / kegiatan / sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 dan untuk mereview hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021. Melalui Dokumen Rencana Kerja ini pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi insitusi baik Pemerintah, Masyarakat maupun Institusi terkait.

Sidoarjo, 30 April 2022

Plt. KEPALA DINAS PU BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SIDOARJO

Ditandatangani secara elektronik oleh

DWI EKO SAPTONO, S.Sos., MM., MT.
NIP. .197002211990031002

DWI EKO SAPTONO. S.Sos.. MM . MT
Pembina Tk I
NIP. 197002211990031002

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sesuai dengan Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatanhukum dan akibat hukum yang sah.

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	22
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	30
BAB V	PENUTUP	38

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sesuai dengan Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatanhukum dan akibat hukum yang sah.

BAB I
PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen Renja Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air ini mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD)
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2022.

Mengingat arti strategis Dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. serta memperhatikan Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Surat Edaran Bupati Sidoarjo Nomor:050/2320/438.6.1/2022 tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat DaerahTahun 2023. Maka, Renja 2023 disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.

1. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan
2. Program dan Kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum

Musrenbang

3. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil, indikator kinerja program (*outcome*) , indikator kinerja kegiatan (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten / Kota adalah sebagaimana tercantum dalam Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja OPD Kabupaten / Kota

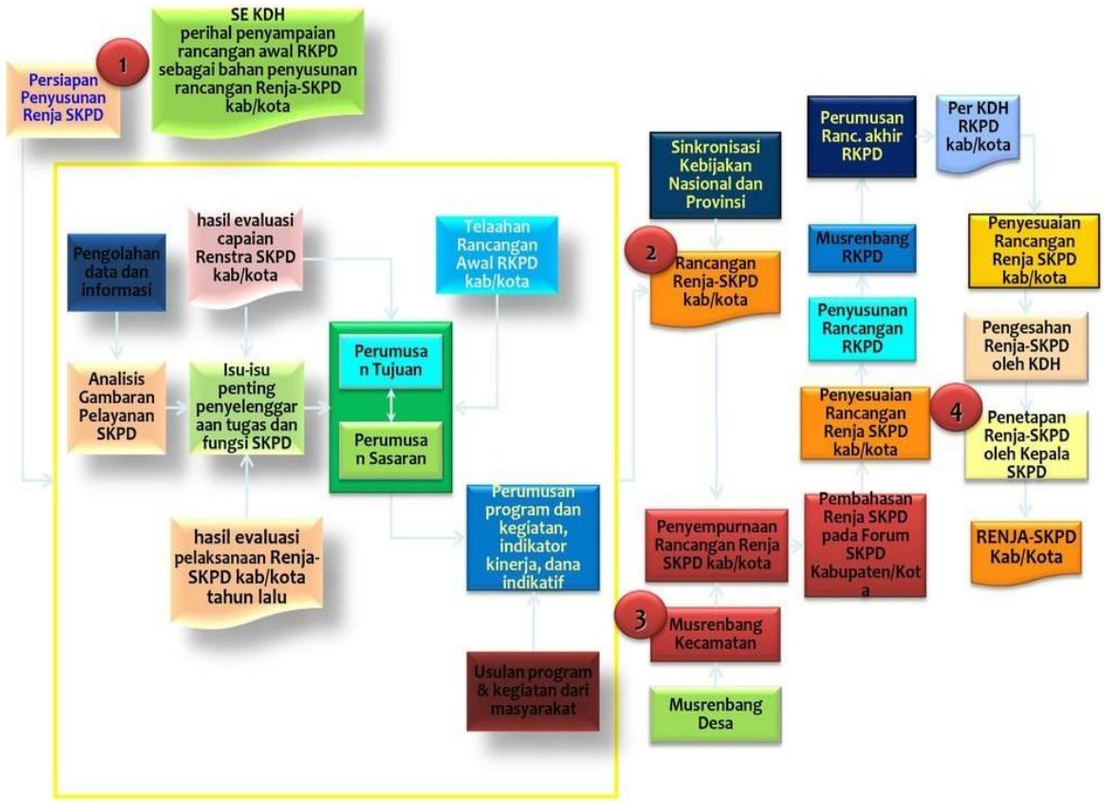

Renja OPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 43 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 06 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo;
20. Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Permendagri No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Surat Edaran Bupati Sidoarjo Nomor:050/2320/438.6.1/2022 tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat DaerahTahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan Tahun 2023 dan perencanaan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023. Tujuan penyusunan Rencana Kerja OPD adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan CapaianRenstra Perangkat Daerah

Program adalah penjabaran kebijakan Kementerian / Lembaga dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Kementerian / Lembaga.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang / jasa.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu (Tahun 2021) sampai dengan tahun berjalan pada Tahun 2022. Pada waktu Tahun Anggaran 2021, Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan 3 Program dengan didukung 10 Kegiatan yang didalamnya ada 49 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran setelah dilakukan Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) adalah sebesar Rp 366.776.971.983,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 300.621.519.091,00 atau 82,01% dengan rincian yang terlihat dalam Tabel 2.1 Realisasi Program / Kegiatan Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 :

Tabel 2.1
Realisasi Program / Kegiatan Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya AirKabupaten Sidoarjo Tahun 2021

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	***24.956.962.437***	***22.108.849.672***	***88,59***
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90.000.000	87.928.500	97,70
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.848.950	2.277.000	79,92
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.329.676.931	14.689.625.570	95,82
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	160.919.224	155.876.050	96,87
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.750.000	4.569.600	96,20
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	400.000.000	359.095.500	89,77
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	83.409.207	82.171.100	98,52
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.385.219	86.868.320	97,18
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	373.800.000	321.062.000	85,89
Penyediaan Barang Cetakan dan	26.654.627	9.872.850	37,04

Penggandaan			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.560.000	7.440.000	70,45
Penyediaan Bahan/Material	73.376.200	72.571.400	98,90
Fasilitasi Kunjungan Tamu	83.330.000	76.604.080	91,93
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	415.540.746	292.011.033	70,27
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	472.468.000	427.200.000	90,42
Pengadaan Mebel	306.768.122	223.151.500	72,74
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.797.393.176	1.679.262.800	93,43
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.224.401	4.124.100	78,94
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.136.738.394	310.968.285	27,36
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.980.648.800	1.573.891.609	79,46
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	355.000.000	207.500.225	58,45
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	349.000.000	205.039.980	58,75
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.409.470.440	1.229.738.170	87,25
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	***62.519.908.058***	***55.218.501.025***	***88,32***
Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	1.797.569.383	1.684.184.764	93,69
Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	3.425.000.000	3.345.073.100	97,67
Peningkatan Tanggul Sungai	16.508.082.664	15.699.077.350	95,10
Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	1.720.000.000	1.604.769.700	93,30
Normalisasi/Restorasi Sungai	5.982.821.593	5.801.543.300	96,97
Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	12.360.511.887	9.844.649.474	79,65
Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	2.630.882.000	1.756.514.763	66,77
Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	83.858.894	49.652.000	59,21
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	487.932.903	263.048.000	53,91
Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	75.000.000	50.575.700	67,43
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	48.800.000	97,60
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	2.349.714.979	1.864.021.347	79,33
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	1.305.439.780	1.275.815.200	97,73
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	5.464.634.000	4.313.463.850	78,93
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	7.926.388.782	7.393.150.177	93,27
Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	108.227.000	0	0
Operasional Unit Pengelola Irigasi	243.844.193	224.162.300	91,93
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	***279.300.101.488***	***223.294.168.394***	***79,95***
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan	3.665.764.490	2.953.811.921	80,58

Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			
Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	61.684.786.656	34.098.929.017	55,28
Pembangunan Jalan	67.934.772.990	61.217.700.855	90,11
Pelebaran Jalan Menuju Standar	52.992.927.291	41.847.566.150	78,97
Rekonstruksi Jalan	54.681.702.399	47.598.474.654	87,05
Pemeliharaan Rutin Jalan	24.770.214.954	23.396.495.643	94,45
Pembangunan Jembatan	11.857.115.708	10.565.184.846	89,10
Rehabilitasi Jembatan	652.817.000	577.251.834	88,42
Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.060.000.000	1.038.753.474	98
TOTAL	**366.776.971.983**	**300.444.409.891**	**82,01**

Berdasarkan tabel diatas, apabila dilihat dari persentase pencapaian realisasi anggaran pada 3 Program yang didukung 10 Kegiatan dengan 49 Sub Kegiatan tercapai sebesar 82,01%. Dari keseluruhan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan di tahun 2021 pada umumnya sudah optimal, sedangkan yang capaian realisasi keuangan yang kurang dari 75 % dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pada **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ,** diantaranya adalah sebagai berikut:

   a. **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** anggaran sebesar Rp. 26.654.627 realisasi sebesar Rp 9.872.850 (37,04%) karena sisa anggaran merupakan alokasi belanja cetak blangko SKRD, sedangkan tahun 2021 retribusi di DPUBMSDA dialihkan ke sewa yang dikelola BPKAD. Oleh sebab itu blangko SKRD tidak diserap.

   b. **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan** anggaran sebesar Rp 10.560.000 realisasi sebesar Rp 7.440.000 (70,45%) dikarenakan sisa dari estimasi kenaikan surat kabar..

   c. **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** anggaran sebesar Rp 415.540.746 realisasi sebesar Rp 292.011.033 (70,27%) dikarenakan pada tahun 2021 masih terjadi pandemic covid 19 dimana kegiatan perjalanan dinas masih dibatasi.

   d. **Pengadaan Mebel** anggaran sebesar Rp 306.768.122 realisasi sebesar Rp 223.151.500 (72,74%) dikarenakan selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak.

   e. **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** anggaran sebesar Rp 1.136.738.394 realisasi sebesar Rp 310.968.285 (27,36%) dikarenakan sisa anggaran merupakan sisa alokasi dari pembayaran tagihan listrik gedung baru yang penggunannya dibatalkan.

   f. **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** anggaran sebesar Rp 355.000.000 realisasi sebesar Rp 207.500.225 (58,45%) dikarenakan tidak

dapat memenuhi persyaratan untuk perpanjangan 5 tahun yakni BPKB belum diketemukan.

g. **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** anggaran sebesar Rp 349.000.000 realisasi sebesar Rp 205.039.980 (58,75%) dikarenakan pada tahun 2021 terdapat beebrapa pengadaan peralatan yang baru, sehingga biaya pemeliharaan tidak direalisasikan seluruhnya.

2) Pada **Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. **Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir** anggaran sebesar Rp. 2.630.882.000 realisasi sebesar Rp 1.756.514.763 (66,77%) dikarenakan Belanja BBM pompa hanyadigunakan pada musim hujan, sehingga masih terdapat sisa anggaran.

b. **Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota** anggaran sebesar Rp. 83.858.894 realisasi sebesar Rp 49.652.000 (59,21%) dikarenakan pada tahun 2021 masih terjadi pandemic covid 19, sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

c. **Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota** anggaran sebesar Rp. 487.932.903 realisasi sebesar Rp 263.048.000 (53,91%) dikarenakan pada tahun 2021 masih terjadi pandemic covid 19, sehingga pembinaan atau sosialisasi belum dapat dilaksanakan maksimal.

d. **Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota** anggaran sebesar Rp. 75.000.000 realisasi sebesar Rp 50.575.700 (67,43%) dikarenakan pada tahun 2021 masih terjadi pandemic covid 19, sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

Selain pengukuran tingkat realisasi anggaran juga dilakukan pengukuran capaian kinerja Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo. Adapun realisasi kinerja sasaran Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 selengkapnya dapat dijelaskan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Realisasi kinerja Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021

No.	TUJUAN	Indikator Kinerja Tujuan	Target Tahun 2022	Realisasi di Tahun 2021	Capaian Tahun 2021 (%)
1	Meningkatnya Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Prosentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	95%	91,93%	102,14%
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Sumber Daya Air	Prosentase kecukupan kebutuhan air irigasi	87%	77,60%	90,23%
		Prosentase luasan genangan/ banjir tertangani	85,51%	74,01%	110,47%

*) Sumber data : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja telah mencapai diatas 90% dari target. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Prosentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap mencapai 91,91% dari target
2) Prosentase kecukupan kebutuhan air irigasi mencapai 77,60% dari target
3) Prosentase luasan genangan/ banjir tertangani mencapai 74,01% dari target

Setelah dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis, selanjutnya dilakukan analisa terhadap keberhasilan dan kegagalan, yang meliputi penjelasan dalam menghadapi permasalahan – permasalahan pencapaian kinerja, beserta upaya – upaya yang dilakukan, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya. Berikut uraian analisis keberhasilan dan kegagalan per sasaran antara lain

2.2 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

TUJUAN 1 : Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur secara lebih memadai

1) Kendala / Permasalahan yang dihadapi :
   - Hujan lebat dalam beberapa hari membuat tanah jenuh air, sehingga menimbulkan genangan
   - Pasang tinggi air laut menyebabkan aliran ke hilir menjadi lambat
   - Saluran/afvour tidak mampu menampung debit tambahan dari air hujan
   - dalam pembangunan frontage road Waru – Buduran adanya kendala Warga merasa harga nilai appraisal belum sesuai harapan

2) Upaya yang telah dilakukan :
   - Penanganan tanggap darurat di Kecamatan Tangulangin (Banjarasri, Banjarpanji, dan Kedungbanteng) telah berhasil menurunkan risiko genanganRencana.

3) Tindak lanjut tahun berikutnya :
   - Pembangunan Rumah Pompa Jalan Raya Jati (Depan Lippo Plaza) Kec. Sidoarjo dengan kapasitas rencana 200 lt/dt
   - Pembangunan Rumah Pompa dan Instalasi Pompa Saluran Gedangrowo Ds. Banjarpanji Kec. Tanggulangin dengan kapasitas rencana total 1800 lt/dt
   - Pembangunan Rumah Pompa dan Instalasi Pompa di DAM Afv. Kedungpeluk Ds. Kedungbanteng Kec. Tanggulangin dengan kapasitas rencana 1400 lt/dt
   - Melakukan survey kondisi ruas jalan di Kabupaten Sidoarjo secara berkala untuk memastikan ruas jalan mana saja yang perlu dilakukan pemeliharaan atau peningkatan
   - Melakukan peningkatan jalan berupa betonisasi untuk ruas jalan strategis di Kabupaten Sidoarjo
   - Peningkatan kualitas SDM operasi pemeliharaan jaringan irigasi melalui Bimtek Juru dan PPA (Penjaga Pintu Air)

- Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo melakukan kerjasama/ MOU dengan BBWS Brantas terkait pemenuhan air irigasi

4) Simpulan atas pencapaian kinerja :

Secara keseluruhan capaian kinerja di tahun 2021 masih termasuk kategori Sangat Berhasil

Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2021

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Tingkat keberhasilan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah TerhadapPelayanan Kesekretariatan	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	2 dokumen	100%	Sangat Berhasil
	Jumlah dokumen monev PD yang tersusun	4 dokumen	4 dokumen	100%	Sangat Berhasil
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	2 dokumen	100%	Sangat Berhasil
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monev PD yang tersusun	4 dokumen	4 dokumen	100%	Sangat Berhasil
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	137 orang	137 orang	100%	Sangat Berhasil
	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	40 jenis	40 jenis	100%	Sangat Berhasil
	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	1 laporan	1 laporan	100%	Sangat Berhasil
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	119 orang	119 orang	100%	Sangat Berhasil
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	40 jenis	40 jenis	100%	Sangat Berhasil
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	1 laporan	1 laporan	100%	Sangat Berhasil
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan danpelatihan formal dan informal	100 orang	90 orang	90%	Cukup
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan informal	100 orang	90 orang	90%	Cukup
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah komponen listrik /penerangan yang tersedia	21 jenis	21 jenis	100%	Sangat Berhasil
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yangtersedia	7 jenis	7 jenis	100%	Sangat Berhasil
	Jumlah BBM yang disediakan	35,600 ltr	30,577ltr	85%	Cukup
	Jumlah cetak penggandaan yang tersedia	13 jenis	13 jenis	100%	Sangat Berhasil

	Jumlah buku bahan bacaan dan koran yang tersedia	3 jenis	3 jenis	100%	Sangat Berhasil
	Jumlah bahan/material yang tersedia	29 jenis	29 jenis	100%	Sangat Berhasil
	Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan	3,611 kotak	1,612 kotak	44%	Kurang
	Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik /penerangan yang tersedia	21 jenis	21 jenis	100%	Sangat Berhasil
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	7 jenis	7 jenis	100%	Sangat Berhasil
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah BBM yang disediakan	35,600 ltr	8,098 ltr	22%	Kurang
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetak penggandaan yang tersedia	13 jenis	13 jenis	100%	Sangat Berhasil
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku bahan bacaan dan koran yang tersedia	3 jenis	3 jenis	100%	Sangat Berhasil
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang tersedia	29 jenis	29 jenis	100%	Sangat Berhasil
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan	3,611 kotak	1,612 kotak	44%	Kurang
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 unit	1 unit	100%	Sangat Berhasil
	Jumlah mebeleur yang diadakan	7 buah	6 buah	85%	Cukup
	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor /rumah dinas/jabatan yang diadakan	18 jenis	18 jenis	100%	Sangat Berhasil
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 unit	1 unit	100%	Sangat Berhasil
Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan	7 buah	7 buah	100%	Sangat Berhasil
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan	18 jenis	18 jenis	100%	Sangat Berhasil
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	6,000 buah	4,000 buah	66%	Kurang
	Rekening listrik. air. telepon dan internet yang terbayar	12 bulan	12 bulan	100%	Sangat Berhasil
	Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	21 orang	21 orang	100%	Sangat Berhasil

	Jumlah pengelola barang yang terbayar	6 orang	6 orang	100%	Sangat Berhasil
	Jumlah pengelola pengadaan barang/jasa yangterbayar	54 orang	54 orang	100%	Sangat Berhasil
	Jumlah pengelola keuangan yang terbayar	20 orang	20 orang	100%	Sangat Berhasil
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	6,000 buah	4,000 buah	66%	Kurang
Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik. air. telepon dan internet yang terbayar	12 orang	12 orang	100%	Sangat Berhasil
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	21 orang	21 orang	100%	Sangat Berhasil
	Jumlah pengelola barang yang terbayar	6 orang	6 orang	100%	Sangat Berhasil
	Jumlah pengelola pengadaan barang/ jasa yangterbayar	54 orang	54 orang	100%	Sangat Berhasil
	Jumlah pengelola keuangan yang terbayar	20 orang	20 orang	100%	Sangat Berhasil
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah luas gedung/kantor yang dipelihara	6000 m2	6000 m2	100%	Sangat Berhasil
	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 jenis	6 jenis	100%	Sangat Berhasil
	Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	42 unit	22 unit	52%	Kurang
	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	10 unit	10 unit	100%	Sangat Berhasil
	Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersihkendaraan yang tersedia	10 unit	10 unit	100%	Sangat Berhasil
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	10 unit	10 unit	100%	Sangat Berhasil
	Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia	10 jenis	10 jenis	100%	Sangat Berhasil
	Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	42 unit	22 unit	52%	Kurang
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 jenis	6 jenis	100%	Sangat Berhasil
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luas gedung/kantor yang dipelihara;	6,000 m2	6,000 m2	100%	Sangat Berhasil
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Sistem irigasi dalam kondisi optimal	88%	86%	97%	Cukup
	Sistem Sumber Daya Air dalam 1 (Satu) Daerah Kabupatendalam kondisi optimal	72%	71%	98%	Cukup
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai	Jumlah Pintu Air/Bendung yang dibangun	3 buah	3 buah	100%	Sangat Berhasil
	Panjang saluran pematusan yangdrehabilitasi	8,400 m	8,400 m	100%	Sangat Berhasil

(WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran pematusan yangditingkatkan	33,000 m	33,000 m	100%	Sangat Berhasil
	Jumlah Rumah Pompa yang ditingkatkan	7 unit	7 unit	100%	Sangat Berhasil
	Panjang saluran yang dipelihara	400 km	400 km	100%	Sangat Berhasil
	Panjang pematusan yang dinormalisasi	24,500 m	24,500 m	100%	Sangat Berhasil
	pompa yang dioperasikan dan dipelihara	29 unit	29 unit	100%	Sangat Berhasil
	Jumlah Stasiun Penakar yang dikelola	30 buah	30 buah	100%	Sangat Berhasil
	Jumlah GHIPPA yang dibina	1 GHIPPA	1 GHIPPA	100%	Sangat Berhasil
	Jumlah Dokumen Rekomtek yang diterbitkan	30 dokumen	30dokumen	100%	Sangat Berhasil
	Jumlah Sidang Komir yang dilaksanakan	1 sidang	-	0%	Kurang
Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung yang dibangun	3 buah	3 buah	100%	Sangat Berhasil
Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang saluran pematusan yang direhabilitasi	8,400 m	8,400 m	100%	Sangat Berhasil
Peningkatan Tanggul Sungai	Panjang saluran pematusan yang ditingkatkan	33,000 m	33,000 m	100%	Sangat Berhasil
Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Rumah Pompa yang ditingkatkan	7 unit	7 unit	100%	Sangat Berhasil
Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang pematusan yang dinormalisasi	24,500 m	24,500 m	100%	Sangat Berhasil
Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang saluran yang dipelihara	400 km	400 km	100%	Sangat Berhasil
Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	pompa yang dioperasikan dan dipelihara	29 unit	29 unit	17%	Kurang
Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Stasiun Penakar yang dikelola	30 buah	30 buah	100%	Sangat Berhasil
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah GHIPPA yang dibina	1 GHIPPA	1 GHIPPA	100%	Sangat Berhasil
Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomtek yang diterbitkan	30 dokumen	30dokumen	100%	Sangat Berhasil
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sidang Komir yang dilaksanakan	1 sidang	-	0%	Kurang
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem	Panjang saluran irigasi yang ditingkatkan	8,900 m	8,698 n	97%	Cukup

Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	9,800 m	7,736 m	78%	Cukup
	Jumlah bendung yang direhabilitasi	0	0	0%	Kurang
	Panjang saluran yang beroperasi dan dipelihara	80 km	73 km	91%	Cukup
	Bendung yang beroperasi dan dipelihara	20 buah	20 buah	100%	Sangat Berhasil
	Operasional UPTD yang tercukupi	4 unit	4 unit	100%	Sangat Berhasil
	Jumlah perencanaan teknis irigasi yang disusun sesuai ketentuan teknis	75 dokumen	108 dokumen	144%	Sangat Berhasil
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah perencanaan teknis irigasi yang disusun sesuai ketentuan teknis	75 dokumen	108 dokumen	144%	Sangat Berhasil
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang saluran irigasi yang ditingkatkan	8,900 m	8,698 m	97%	Cukup
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	9,800 m	7,736 m	78%	Cukup
Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah bendung yang direhabilitasi	0	0	0%	Kurang
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang saluran yang beroperasi dan dipelihara	80 km	73 km	91%	Cukup
Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Bendung yang beroperasi dan dipelihara	20 buah	20 buah	100%	Sangat Berhasil
Operasional Unit Pengelola Irigasi	Operasional UPTD yang tercukupi	4 unit	4 unit	100%	Sangat Berhasil
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Prosentase panjang jalan dan jembatan yang dipelihara	100%	91%	91%	Cukup
	Prosentase panjang jalan kabupaten yang dibangun	100%	84%	84%	Cukup
	Prosentase panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan	100%	92%	92%	Cukup
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Luas Lahan yang dibebaskan untuk jalan kabupaten	6,000 m2	4,772 m2	79%	Cukup
	Jumlah panjang jalan kabupaten yang dibangun	1,630 m	2,555 m	156%	Sangat Berhasil
	Jumlah panjang Penahan jalan kabupaten yang dibangun	6,750 m	9,129 m	135%	Sangat Berhasil
	Jumlah panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan menuju standar	9,500 m	10,963 m	115%	Sangat Berhasil
	Jumlah Panjang Jalan kabupaten yang ditingkatkan	9,168 m	8,482 m	92%	Cukup
	Jumlah Jembatan Kabupaten yang Dibangun	2 buah	2 buah	100%	Sangat Berhasil

	Jumlah Perijinan Pemanfaatan Jalan dan Jembatan yangdikeluarkan	-	-	0%	Kurang
	Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Jalan	30 dokumen	30 dokumen	100%	Sangat Berhasil
	Panjang jalan yang direhabilitasi/dipelihara	127,779 m	127,779 m	100%	Sangat Berhasil
	Jumlah Jembatan yang direhabilitasi / dipelihara	11 buah	10 buah	90%	Cukup
	Jumlah perencanaan teknis jalan dan jembatan yang disusun sesuai ketentuan teknis	39 dokumen	39 dokumen	100%	Sangat Berhasil
Penyusunan Rencana. Kebijakan. dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah perencanaan teknis jalan dan jembatan yang disusun sesuai ketentuan teknis	39 dokumen	39 dokumen	100%	Sangat Berhasil
Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	luas lahan yang dibebaskan untuk jalan kabupaten	6,000 m2	4,772 m2	79%	Kurang
Pembangunan Jalan	Jumlah panjang jalan kabupaten yang dibangun	1,630 m	2,555 m	156%	Sangat Berhasil
	Jumlah panjang Penahan jalan kabupaten yang dibangun	6,750 m	9,129 m	135%	Sangat Berhasil
Pelebaran Jalan Menuju Standar	Jumlah panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan menuju standar	9,500 m	10,963 m	115%	Sangat Berhasil
Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan kabupaten yang ditingkatkan	9,168 m	8,482 m	92%	Cukup
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi/dipelihara	127,779 m	127,779 m	100%	Sangat Berhasil
Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan Kabupaten yang Dibangun	2 buah	2 buah	100%	Sangat Berhasil
Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang direhabilitasi / dipelihara	11 buah	11 buah	100%	Sangat Berhasil
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Perijinan Pemanfaatan Jalan dan Jembatan yangdikeluarkan	0 dokumen	0 dokumen	0%	Kurang
	Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Jalan	30 dokumen	30 dokumen	100%	Sangat Berhasil

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Pencapaian kinerja pelayanan OPD Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo terlihat dalam tabel 2.4 berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo

Sasaran 1: Meningkatnya Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap; **Sasaran 2** : Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Sumber Daya Air, dengan capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2017			2018			2019			2020			2021		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
Prosentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	84%	80%	95%	85%	93,06%	109,48%	87%	91,48%	105,14%	90%	82%	91,11%	90%	91,93%	102,14%
Prosentase kecukupan kebutuhan air irigasi	82%	72%	87%	84%	85,73%	102,06%	85%	83%	97%	86%	85,38%	99,28%	86%	77,60%	90,23%
Prosentase luasan genangan/ banjir tertangani	60%	44%	74%	64%	55%	85,94%	65%	53.3%	82%	67%	61,61%	91,96%	67%	74,01%	110,47%
Prosentase bangunan yang ber-IMB	60,50%	50%	82%	61%	53%	86,89%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prosentase peningkatan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	66%	60%	90%	60%	55%	91,67%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Kab/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. .

Isu strategis bagi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo diperoleh berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman di masa lima tahun mendatang. Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi, Misi Bupati Sidoarjo, Renstra Kementerian, Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur dan Renetra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, Rencana Tata Ruang Wilayah Sidoarjo, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta memperhatikan faktor pendorong dan penghambat, diperoleh isu - isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius dalam menanganinya melalui program dan kegiatan Dinas PU Bina Marga dan Sumbr Daya Air Kabupaten Sidoarjo, sehingga tujuan yang ditetapkan dalam Renstra dapat tercapai.

Isu - isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan jalan dan jembatan

   Pertumbuhan Kabupaten Sidoarjo yang cukup pesat membutuhkan dukungan infrastruktur jaringan jalan yang memadai Tingginya laju pertumbuhan dan pesatnya kegiatan sosial ekonomi serta masih adanya kesenjangan antar wilayah, memerlukan pengembangan infrastruktur secara terpadu, integral dan lintas sector.

   Banyaknya jaringan jalan dengan kondisi rusak akibat drainase yang kurang menunjang ataupun kurang terkendalinya angkutan berat dengan tonase yang tidak sesuai dengan MST (Muatan Sumbu Terberat) yang diijinkan, berdampak kondisi *existing* jalan tidak sesuai dengan umur rencana. Terkait dengan hal tersebut ke depan diharapkan pembangunan infrastruktur jaringan jalan selain harus terintegrasi dengan pembangunan drainase.juga peningkatan kualitas jalan, perlu dipertimbangkan beberapa alternatif jenis konstruksi lapis permukaan yang sesuai dengan kondisi kelas jalan dan struktur tanah jalan, antara lain dengan menggunakan **ASBUTON** ataupun jenis perkerasan lain (konstruksi Beton Cor) sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu dari tahun ke tahun pertumbuhan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat bahkan kendaraan berat/besar terus meningkat sedangkan akses jalan relatif masih tetap (tidak sebanding dengan

peningkatan kualitas dan kuantitas jalan); sehingga perlu adanya upaya optimal untuk menambah panjang jalan dan lebar jalan.

2. Belum optimalnya tingkat capaian atau kecukupan kebutuhan air untuk irigasi

   Menurunnya lahan pertanian produktif yang berubah menjadi kawasan Perumahan, Industri dan Jasa Perdagangan. sebagai dampak perkembangan ekonomi dan sosial di wilayah Sidoarjo, perlu dilakukan pemetaan terhadap jenis penanganan Jaringan Irigasi pada wilayah lahan produktif pertanian dan penanganan pada jaringan Irigasi yang arahnya pada penanggulangan banjir; dan diperlukan adanya perubahan fungsi saluran dari saluran pembawa menjadi saluran pembuang

   Selain kondisi fisik bangunan dan jaringan yang memerlukan rehabilitasi, kondisi lingkungan di sekitar jaringan irigasi juga memerlukan perhatian. Pada sebagian besar lokasi ditemui bangunan liar, tanaman keras (misal sengon) maupun tanaman yang berpotensi merusak pasangan tebing (misal rumput gajah). Untuk itu diperlukan percepatan pengembangan jaringan irigasi teknis pendukung sektor pertanian dan perikanan

3. Penurunan luas genangan banjir di permukiman relatif lambat

   Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah yang memiliki potensi bencana khususnya bencana banjir yang terjadi pada kawasan di 15 wilayah kecamatan di Sidoarjo. . Hal ini disebabkan sebagian besar fungsi sungai di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai saluran irigasi yang sekaligus sebagai saluran pematusan. Kondisi daya tampung sungai berkurang secara vertikal (Sedimentasi) sementara penambahan tampungan secara horisontal (pelebaran dan pemanfaatan sempadan) sulit dilakukan. Hal –hal yang mempengaruhi kinerja afvoer/saluran pembuang adalah tingginya sedimentasi, timbulan sampah, pelanggaran sempadan saluran, dan kerusakan tanggul, sehingga memerlukan tindakan monitoring dan evaluasi yang lebih intensif, serta pemeliharaan secara rutin/ berkala.

   Mewujudkan kepemerintahan yang baik, penyederhanaan birokrasi, penguatan komitmen dan pengembangan kualitas ASN, serta pemantapan sistim informasi pembangunan yang transparan dan membuka ruang aspirasi secara luas untuk mendukung inovasi pelayanan publik.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen yang menjadi pedoman sekaligus acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) ataupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2023, maka penyusunan Renja OPD Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2023 harus memperhatikan kebutuhan alokasi anggaran guna mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam Penyusunan Program dan Kegiatan Renja 2023, untuk nomenklatur program dan kegiatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Penetapan pagu anggaran dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2023 yang diperuntukkan bagi

OPD Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo setelah dilakukan analisis kebutuhan ternyata alokasi anggaran tersebut tidak mencukupi sehingga dalam penyusunan dan penetapan KUA & PPAS Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo perlu adanya penyesuaian pagu anggaran dengan kebutuhan dana OPD Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo.

Adapun rancangan awal RKPD adalah sebagaimana terlampir (Lampiran 1)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Tahun 2023 Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo mendapatkan usulan kegiatan dalam Musrenbang Tahun 2023. Namun, tidak semua usulan Musrenbang tersebut dapat terlaksana karena keterbatasan pagu anggaran dan prioritas kegiatan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaah terhadap kebijakan nasional dilakukan dengan menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), dan juga mengenai pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan. Perlu juga dilakukan telaahan atas kebijakan dari provinsi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi. Sesuai dengan arah kebijakan, sasaran prioritas dan strategi nasional, maka program dan kegiatan di Kementerian pekerjaan umum mengarah kepada program prioritas yaitu Kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

Dalam perencanaan pembangunan sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat, Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis pembangunan pada Dokumen Renstra Tahun 2020 - 2024. Adapun uraian singkat mengenai Renstra Kementerian PUPR 2020 - 2024 tersebut, adalah sebagai berikut : Visi pembangunan di bidang pekerjaan umum yang ditetapkan adalah : ”Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden - Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Isu – isu strategis yang dikembangkan dalam penyusunan Rentra Kementerian PUPR 2020 – 2024 antara laian adalah :

a) Kapasitas layanan infrastruktur penyedia air baku yang aman dan layak di Indonesia hingga tahun 2019 hanya mencakup 30% dari total kebutuhan air baku nasional. Kondisi ini mendorong maraknya pemanfaatan sumber air baku lain yang belum tentu aman dan layak, baik secara kuantitas maupun kualitas. Peningkatan tekanan populasi dan aktivitas ekonomi di daerah-daerah aglomerasi dan kutub pertumbuhan seperti perkotaan dan kawasan strategis (KEK, KI, KSPN) juga perlu diperhatikan pemenuhan kebutuhan air bakunya melalui infrastruktur penyedia air baku agar tidak terdapat potensi ekstraksi air tanah dalam skala besar.
b) Kapasitas tampungan air masih rendah akibat terbatasnya jumlah bendungan, embung, dan penampung air lainnya, sedangkan optimalisasi bendungan menghadapi tantangan tata kelola akibat ancaman sedimentasi dan penurunan tingkat keamanan. Rata-rata penurunan volume tampungan waduk akibat sedimentasi hingga tahun 2019 di pulau Jawa mencapai 31%.

c) Untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana seperti banjir; gempa bumi; tanah longsor; dan letusan gunung berapi, dibutuhkan infrastruktur ketahanan bencana yang memada dan didukung system informasi yang handal (*decission support system, forecasting, early warning, mitigation dan risk management).* Mitigasi risiko bencana melalui pengembangan industri konstruksi menghadapi kendala akibat keterbatasan SDM dan belum berkembangnya ekosistem industri konstruksi.
d) Jaringan jalan sebagai moda utama angkutan penumpang dan logistik, dihadapkan pada tantangan belum memadainya kualitas prasarana jalan serta masih kurangnya ketersediaan jaringan jalan untuk mendukung pengembangan wilayah. Dari aspek kualitas, terdapat ketimpangan antara jalan nasional dengan jalan daerah. Jalan nasional yang memiliki proporsi 8% dari seluruh jaringan yang ada, dengan kondisi mantap mencapai 92,81%, sementara jalan daerah yang memiliki proporsi 92% dari seluruh jaringan jalan, baru mencapai kondisi mantap sebesar 68,49% untuk provinsi, dan 58,8% untuk kabupaten/kota.

Mengacu pada tugas, fungsi serta wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang - undangan kepada Kementerian PUPR dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selanjutnya Kementerian PUPR menjabarkan misi pembangunan tersebut dengan tujuan pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian,

pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.

2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya *smart living*, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan 4 (empat) misi ke dalam 5 (lima) Sasaran Strategis. yaitu:

SS - 1	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja : 1) Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat (%); 2) Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pusat (%); 3) Kapasitas tampung per kapita (m3/kapita) 4) Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi (m3/tahun/hektar)
SS - 2	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam per 100 km)
SS - 3	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja: 1) Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan *smart living* (%), 2) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni (%).
SS - 4	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan professional, dengan Indikator Kinerja: 1) Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;

	2) Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja
SS– 5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya, dengan Indikator Kinerja: 1) Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR; 2) Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif; 3) Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur; 4) Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR; 5) Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis; 6) Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi

Hasil akhir atau dampak yang diharapkan dari seluruh pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, yang diindikasikan dengan:

a. Peningkatan daya saing infrastruktur, dengan indikator: (1) Peringkat Daya Saing Infrastruktur Umum dan Jalan; (2) *Global Competitiveness Index* dan Pilar Infrastruktur; (3) *Logistic Performance Index*.
b. Peningkatan daya saing konstruksi nasional, dengan indikator Indeks Bisnis Konstruksi.
c. Peningkatan kemudahan berusaha, dengan indikator peringkat *Ease of Doing Bussiness*.
d. Peningkatan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah yang dihasilkan pada tahap konstruksi dan operasi.
e. Penurunan tingkat kesenjangan antar wilayah, dengan indikator Koefisien Rasio Gini.
f. Peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan indikator Kesejahteraan Rakyat.

Terkait dengan sasaran strategis Kemeterian PUPR tersebut maka tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air kabupaten Sidoarjo relevan dengan pencapaian sasaran 1 yaitu “Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air” terutama dalam hal peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai dan layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi, serta sasaran 2 “Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional”.

Faktor pendorong pelaksanaan pencapaian sasaran tersebut antara lain bahwa melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

26/PRT/M/2017 Tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah ditetapkan sasaran pembangunan PUPR berupa Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030.

Adapaun tahapan Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut yang akan dilaksanakan pelaksanaan pada **t**ahun 2020 – 2024 adalah :

1) Bendungan multifungsi untuk memenuhi kapasitas tampung 68,11 m3/kapita/ tahun. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 577 Triliun.
2) Kondisi Jaringan jalan: Kondisi Jalan Mantap 97%; Pembangunan Jalan Tol 1.500 Km; Pembangunan Jalan Baru 2.500 Km; Pembangunan Jembatan Baru/Fly Over 60.000m. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 330 Triliun (ditambah Rp 243 Triliun dari investasi swasta).
3) 88% Pelayanan Air Minum, menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan 2,6% (menjadi 17.000 ha), dan 85% Pelayanan Sanitasi. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 128 Triliun
4) Backlog rumah bagi MBR sebesar 5 juta unit, dicapai melalui pembangunan sebesar 3,9 juta unit. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 780 Triliun melalui 20%-30% APBN/APBD dan 70%-80% swasta/masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan

Tujuan Perangkat Daerah (PD) merupakan penyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai oleh setiap PD dalam satu periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis setiap PD. Tujuan PD harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi setiap OPD.

Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo menetapkan Tujuan dalam Renstra Tahun 2021 - 2026 adalah :

“Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan infrastruktur Secara Memadai“,

dengan Indikator :

“Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air”

Rumusan Tujuan Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo tersebut di atas mempunyai makna atau arti sebagai berikut :

a. Memiliki orientasi ke masa depan dan mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu 2021 – 2026.
b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas pada bidang perencanaan pembangunan
c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi

d. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo dan juga stakeholders.

3.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi yang telah ditetapkan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pekerjaan umum dan tata ruang khususnya subbidang bina marga dan subbidang sumber daya air, meliputi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, serta penyelenggaraan administrasi berlandaskan pemanfaatan sumber daya dan ruang yang optimal, agar berhasil guna dan pencapaian hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Dalam rangka pencapaian tujuan, “Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan infrastruktur Secara Memadai“, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, menetapkan Sasaran yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan program/kegiatan dalam tahun 2019-2024 yaitu:

1) Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan irigasi.
2) Meningkatnya jalan kabupaten dalam kondisi mantap.

3.3 Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Utama Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo terlihat pada Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Utama Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formula/ Perhitungannya
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan irigasi	Persentase kecukupan kebutuhan air irigasi	Luas sawah yang dapat diairi / Luas sawah yang ada x 100 %
		Persentase sistem drainase dalam kondisi baik	Jumlah drainase dalam kondisi baik / Jumlah drainase yang ada x 100 %
2	Meningkatnya jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	(Panjang jalan kondisi baik + sedang) / Panjang jalan kabupaten x 100%

- Jumlah Program dalam Renja Tahun 2023 : 4 Program
- Jumlah Kegiatan dalam Renja Tahun 2023 : 10 Kegiatan
- Jumlah Sub Kegiatan dalam Renja Tahun 2023 : 41 Sub Kegiatan

Rincian Program pada Renja Tahun 2023 antara lain :

- 1.03.06 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
- 1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
- 1.03.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan

Rincian Kegiatan pada Renja Tahun 2022 antara lain :

- 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Rincian Sub Kegiatan pada Renja Tahun 2022 antara lain :

- 1.03.06.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
- 1.03.06.2.01.04 Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan
- 1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
- 1.03.06.2.01.06 Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
- 1.03.06.2.01.07 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
- 1.03.06.2.01.08 Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan
- 1.03.06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
- 1.03.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
- 1.03.02.2.02.02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
- 1.03.02.2.02.08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
- 1.03.02.2.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
- 1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
- 1.03.02.2.02.27 Operasional Unit Pengelola Irigasi
- 1.03.02.2.02.28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
- 1.03.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- 1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 1.03.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material
- 1.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- 1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 1.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 1.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan
- 1.03.10.2.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
- 1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
- 1.03.10.2.01.22 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
- 1.03.10.2.01.23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
- 1.03.10.2.01.18 Rehabilitasi Jembatan
- 1.03.10.2.01.16 Penggantian Jembatan
- 1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Hasil Musrenbang terlihat pada BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tabel 3.3 Rencana Kerja Tahun 2022 . Rumusan Rencana Kerja tersebut dapat berubah seiring dengan adanya verifikasi Renja yang akan dilakukan. (terlampir). Lampiran 2

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 3.3 Rencana Kerja Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**								**1,212,517,973,067**					**429,978,183,950**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**24,717,366,968**					**29,267,042,798**
1	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**6,500,000**					**0**
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		100 persen	0 Dokumen 1 Dokumen	91 persen	6,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100 persen	0
1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**16,218,404,976**					**19,120,890,499**
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		100 persen	119 Orang/bulan	91 %	16,213,654,976	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100 persen	19,115,665,499
1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		100 persen	1 Laporan	91 %	4,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100 persen	5,225,000
1	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**432,000,000**					**275,000,000**
1	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		100 persen	100 Orang	91 %	432,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah	100 persen	275,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
																terhadap pelayanan kesekretariatan		
1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**2,665,057,931**					**2,587,634,549**
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		100 persen	21 Paket	91 persen	121,495,715	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100 persen	218,768,914
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		100 persen	7 Paket	91 persen	300,566,261	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100 persen	282,432,928
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		100 persen	1 Paket	91 persen	743,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100 persen	712,095,616
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		100 persen	13 Paket	91 persen	78,801,305	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100 persen	79,174,200
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		100 persen	3 Dokumen	91 persen	8,880,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap	100 persen	3,720,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
																pelayanan kesekretariatan		
1	03	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		100 persen	29 Paket	91 persen	62,130,767	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100 persen	279,231,921
1	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		100 persen	12 Laporan	91 persen	475,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100 persen	450,500,000
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		100 persen	1 Laporan	91 persen	875,183,883	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100 persen	561,710,970
1	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**324,297,875**					**0**
1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		100 persen	9 Unit	91 persen	324,297,875	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100 persen	0
1	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**3,694,056,186**					**4,319,517,750**
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		100 persen	12 Laporan	91 persen	68,232,586	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap	100 persen	12,528,950

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
																pelayanan kesekretariatan		
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		100 persen	12 Laporan	91 persen	661,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100 persen	1,335,000,000
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		100 persen	12 Laporan	91 persen	2,964,823,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100 persen	2,971,988,800
1	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,377,050,000**					**2,964,000,000**
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		100 persen	10 Unit	91 persen	575,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100 persen	425,000,000
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		100 persen	4 Unit	91 persen	290,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100 persen	265,000,000
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		100 persen	5 Unit	91 persen	512,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan	100 persen	2,274,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
																kesekretariatan		
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**								**69,944,479,430**					**20,309,672,500**
1	**03**	**02**	**2.02**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**69,944,479,430**					**20,309,672,500**
1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Persentase Saluran Irigasi dalam kondisi baik	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Persentase kecukupan kebutuhan air irigasi.		89 persen	47 Dokumen	88 persen	4,204,469,085	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Saluran Irigasi dalam kondisi baik	89 persen	1,593,625,000
1	03	02	2.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Saluran Irigasi dalam kondisi baik	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Persentase kecukupan kebutuhan air irigasi.		89 persen	1.1 KM	88 persen	14,695,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Saluran Irigasi dalam kondisi baik	89 persen	6,719,000,000
1	03	02	2.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Saluran Irigasi dalam kondisi baik	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Persentase kecukupan kebutuhan air irigasi.		89 persen	25 KM	88 persen	3,095,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Saluran Irigasi dalam kondisi baik	89 persen	2,627,311,500
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Saluran Irigasi dalam kondisi baik	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Persentase kecukupan kebutuhan air irigasi.		89 persen	1.1 KM	88 persen	1,750,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Saluran Irigasi dalam kondisi baik	89 persen	630,000,000
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Saluran Irigasi dalam kondisi baik	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Persentase kecukupan kebutuhan air irigasi.		89 persen	80 KM	88 persen	29,759,258,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Saluran Irigasi dalam kondisi baik	89 persen	6,739,736,000
1	03	02	2.02	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Persentase Saluran Irigasi dalam kondisi baik	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi	Persentase kecukupan kebutuhan air irigasi.		89 persen	4 Unit	88 persen	16,035,129,845	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Saluran Irigasi dalam kondisi baik	89 persen	0
1	03	02	2.02	28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Persentase Saluran Irigasi dalam kondisi baik	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	Persentase kecukupan kebutuhan air irigasi.		89 persen	18 DI	88 persen	405,172,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Saluran Irigasi dalam kondisi baik	89 persen	2,000,000,000
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**								**91,491,659,560**					**31,059,049,437**
1	**03**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**91,491,659,560**					**31,059,049,437**
1	03	06	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Saluran Drainase yang ditingkatkan dan dipelihara	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Persentase luasan genangan/ banjir tertangani		27 persen	47 Dokumen	69 persen	2,576,875,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Saluran Drainase yang ditingkatkan dan dipelihara	27 persen	2,823,453,400
1	03	06	2.01	04	Pembinaan Teknik Sistem	Persentase Saluran	Jumlah Peserta yang Mengikuti	Persentase		27 pers	100 Orang	69 persen	488,154,700	PENDAPATAN		Persentase	27	0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Drainase Perkotaan	Drainase yang ditingkatkan dan dipelihara	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	luasan genangan/ banjir tertangani		en				ASLI DAERAH (PAD)		Saluran Drainase yang ditingkatkan dan dipelihara	persen	
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Saluran Drainase yang ditingkatkan dan dipelihara	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	Persentase luasan genangan/ banjir tertangani		27 persen	1100 M	69 persen	21,175,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Saluran Drainase yang ditingkatkan dan dipelihara	27 persen	4,356,000,000
1	03	06	2.01	06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Persentase Saluran Drainase yang ditingkatkan dan dipelihara	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Persentase luasan genangan/ banjir tertangani		27 persen	4400 M	69 persen	24,495,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Saluran Drainase yang ditingkatkan dan dipelihara	27 persen	16,540,700,000
1	03	06	2.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Persentase Saluran Drainase yang ditingkatkan dan dipelihara	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	Persentase luasan genangan/ banjir tertangani		27 persen	2200 m	69 persen	5,870,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Saluran Drainase yang ditingkatkan dan dipelihara	27 persen	6,792,500,000
1	03	06	2.01	08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Saluran Drainase yang ditingkatkan dan dipelihara	Jumlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	Persentase luasan genangan/ banjir tertangani		27 persen	5 Unit	69 persen	551,702,760	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Saluran Drainase yang ditingkatkan dan dipelihara	27 persen	546,396,037
1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Persentase Saluran Drainase yang ditingkatkan dan dipelihara	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	Persentase luasan genangan/ banjir tertangani		27 persen	1100 M	69 persen	36,334,927,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Saluran Drainase yang ditingkatkan dan dipelihara	27 persen	0
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**								**1,026,364,467,109**					**349,342,419,215**
1	**03**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**								**1,026,364,467,109**					**349,342,419,215**
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan	Persentase jalan kabupaten Sidoarjo dalam kondisi mantap	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis,	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		90.3 persen	13 Dokumen	91 persen	11,375,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan kabupaten	90.3 pers	1,291,045,226

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		Pengelolaan Pengendalian									Sidoarjo dalam kondisi mantap	en	
1	03	10	2.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kabupaten Sidoarjo dalam kondisi mantap	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		90.3 persen	12168 M²	91 persen	127,303,875,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan kabupaten Sidoarjo dalam kondisi mantap	90.3 persen	0
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Persentase jalan kabupaten Sidoarjo dalam kondisi mantap	Panjang Jalan yang Dibangun	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		90.3 persen	1.65 KM	91 persen	135,657,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan kabupaten Sidoarjo dalam kondisi mantap	90.3 persen	57,200,000,000
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Persentase jalan kabupaten Sidoarjo dalam kondisi mantap	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		90.3 persen	38 KM	91 persen	711,890,508,270	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan kabupaten Sidoarjo dalam kondisi mantap	90.3 persen	245,111,781,365
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase jalan kabupaten Sidoarjo dalam kondisi mantap	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		90.3 persen	209 KM	91 persen	33,924,266,339	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan kabupaten Sidoarjo dalam kondisi mantap	90.3 persen	41,217,911,504
1	03	10	2.01	16	Penggantian Jembatan	Persentase jalan kabupaten Sidoarjo dalam kondisi mantap	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		90.3 persen	1000 M	91 persen	1,665,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan kabupaten Sidoarjo dalam kondisi mantap	90.3 persen	0
1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Persentase jalan kabupaten Sidoarjo dalam kondisi mantap	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		90.3 persen	200 M	91 persen	3,300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan kabupaten Sidoarjo dalam kondisi mantap	90.3 persen	3,465,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	03	10	2.01	22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Persentase jalan kabupaten Sidoarjo dalam kondisi mantap	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		90.3 persen	10 Dokumen	91 persen	407,908,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan kabupaten Sidoarjo dalam kondisi mantap	90.3 persen	422,125,000
1	03	10	2.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Persentase jalan kabupaten Sidoarjo dalam kondisi mantap	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		90.3 persen	10 Dokumen	91 persen	840,408,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan kabupaten Sidoarjo dalam kondisi mantap	90.3 persen	634,556,120
												TOTAL	**1,212,517,973,067**					**429,978,183,950**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2021-2026. Renja Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala Pemerintahan Kabupaten, jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Renja Tahun 2023 ini juga mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021.

Dengan tersusunnya Renja Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Selain itu juga mewujudkan tujuan Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air yaitu "**Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan infrastruktur Secara Memadai**", dengan sasaran yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan program/kegiatan dalam tahun 2019-2024 yaitu: (1) Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan irigasi, dan (2) Meningkatnya jalan kabupaten dalam kondisi mantap.

Sidoarjo, 30 April 2022

Plt. KEPALA DINAS PU BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SIDOARJO

Ditandatangani secara elektronik oleh

DWI EKO SAPTONO, S.Sos., MM., MT.
NIP. .197002211990031002

DWI EKO SAPTONO. S.Sos.. MM . MT
Pembina Tk I
NIP. 197002211990031002

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sesuai dengan Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatanhukum dan akibat hukum yang sah.